

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN
MALUNDA, KABUPATEN MAJENE: ANALISIS DARI PERSPEKTIF
ILMU POLITIK**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Politik

PUTRIANI

F0119324

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DALAM MENANGGULANGI BENCANA
BANJIR DI KECAMATAN MALUNDA, KABUPATEN
MAJENE: ANALISIS DARI PERSPEKTIF ILMU
POLITIK
NAMA : PUTRIANI
NIM : F0119324
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan, guna memenuhi persyaratan untuk
ujian akhir skripsi memperoleh gelas Sarjana Ilmu Politik (S1).

Majene, 04 September 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing 1

Dr. H. Burhanuddin, M. Si
NIP: 196209191989031004

Pembimbing 2

Ahmad Amiruddin, S.IP. MA
NIP: 198709232019031007

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Sulawesi Barat

Dr. H. Burhanuddin, M. Si
NIP: 196209191989031004

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MALUNDA,
KABUPATEN MAJENE: ANALISIS DARI PERSPEKTIF ILMU POLITIK**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

PUTRIANI

FO119324

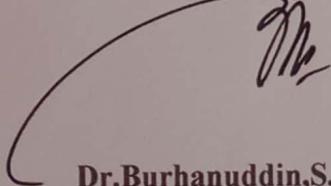
Telah diujikan didepan Dewan Penguji

Pada tanggal, 4 September 2024, dan dinyatakan **LULUS**

Susunan Dewan Penguji:

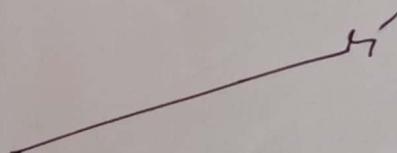
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muh. Yusri AR,S.IP.,MA	Ketua Penguji	(.....)
2. A.Nur Fiqhi Utami,S.IP.M.IP	Penguji Utama	(.....)
3. Pahrudin S.IP,M.SI	Penguji/Anggota	(.....)

Pembimbing I



Dr. Burhanuddin, S.IP, MA
NIP: 196209191989031004

Pembimbing II



Ahmad Amiruddin, S.IP, MA
NIP: 198709232019031004

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene: Analisis dari Perspektif Ilmu Politik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai strategi yang diterapkan oleh badan penanggulangan bencana daerah dalam upaya penanggulangan bencana banjir yang sering terjadi di Kecamatan Malunda, serta mengevaluasi tingkat efektivitas dari strategi-strategi tersebut dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memberikan gambaran mendalam dan terperinci mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber yang berkompeten, observasi langsung di lokasi penelitian, serta studi dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan utama: (1) Apa saja strategi yang telah diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene? dan (2) Bagaimana efektivitas strategi-strategi tersebut dalam mengurangi dampak bencana banjir di wilayah tersebut? Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah mencakup lima langkah utama: perencanaan dan mitigasi, sistem peringatan dini, evakuasi dan penanganan darurat, keterlibatan masyarakat, serta alokasi anggaran dan sumber daya. Evaluasi terhadap efektivitas strategi-strategi tersebut menunjukkan hasil yang positif, di mana langkah-langkah yang diambil telah berhasil mengurangi risiko dan dampak negatif dari bencana banjir, baik dari segi kerugian material maupun korban jiwa. Kesimpulannya, strategi yang diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk Kecamatan Malunda terbukti efektif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana banjir, sehingga bencana ini dapat ditangani dengan lebih baik di masa mendatang.

Kata kunci: strategi, BPBD, bencana banjir.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam. Bencana alam merupakan fenomena alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kehancuran lingkungan yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan pembangunan yang telah dibangun selama ini (Rosyidie, 2013). Bencana alam yang seringkali melanda Indonesia salah satunya adalah bencana banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang disebabkan oleh beberapa faktor alam, salah satu faktornya adalah curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang meningkat dalam waktu berjam-jam yang membuat debit sungai meningkat sehingga sungai tidak mampu menampung airnya mengakibatkan melimpah ke pemukiman masyarakat, keadaan topografi yang berupa dataran rendah, kemampuan infiltrasi tanah yang rendah, meluapnya limpasan air permukaan dan jumlahnya telah melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase, sistem aliran sungai atau sejenisnya. Selain itu, rendahnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan juga dapat dijadikan salah satu pemicu terjadinya banjir seperti, membuang sampah ke sungai, melakukan penebangan liar, pembangunan permukiman di daerah banjir, serta merusak hulu sungai (Mahardika, D., & Setianingsih, E. L, 2018).

Bencana banjir merupakan ancaman alam yang kerap terjadi dan seringkali menimbulkan banyak kerugian, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Saat ini kecenderungan bencana banjir masih cenderung meningkat baik di pedesaan

maupun di perkotaan yang setiap tahun terjadi di seluruh penjuru tanah air. Kecenderungan meningkatnya bencana banjir tidak hanya luasnya saja melainkan kerugiannya ikut bertambah bencana banjir sebagai salah satu fenomena alam, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi kehidupan masyarakat (Pratomo, 2008).

Banjir adalah masalah aktual yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu wilayah di Kabupaten Majene yang rawan terhadap bencana banjir adalah Kecamatan Malunda, dimana banjir ini sudah terjadi dari tahun 1983 sampai sekarang di Kecamatan Malunda masih sering terendam banjir. Titik-titik atau lokasi rawan banjir di wilayah Kecamatan Malunda seringkali dikaitkan dengan keberadaan sungai-sungai utama maupun anak-anak sungai yang ada. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan ketinggian banjir, dari tahun 2022 Kecamatan ini sudah identik dengan kawasan banjir.

Penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Malunda umumnya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi dimana volume air hujan seringkali melebihi kapasitas sungai. Keterbatasan sungai dalam menampung air hujan juga menyebabkan air meluap ke daerah sekitarnya dan menggenangi beberapa wilayah. Selain cuaca ekstrem dan curah hujan diatas normal yang berlangsung lama, ada beberapa masalah yang terjadi berkaitan dengan bencana banjir yang melanda daerah tersebut, yaitu sistem drainase yang buruk, tersumbatnya air sungai oleh sampah serta pendangkalan dan penyempitan anak sungai.

Kejadian banjir yang melanda Kecamatan Malunda dan sekitarnya menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi warga. Hal tersebut sempat

mengharuskan sebagian warga mengungsi. Akibat dari bencana banjir tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dan psikologinya. Berdasarkan nilai kerusakan dan kerugian ditimbulkan dari bencana banjir terlihat masyarakat cukup resah dengan dampak yang diterima dari bencana ini. Hal ini dikhawatirkan dapat kembali terjadi apabila belum ditangani dengan optimal.

Bencana banjir tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalisir dampaknya dengan cara penanggulangan terhadap banjir. Langkah-langkah perencanaan penggunaan lahan yang tepat adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi risiko banjir dan kerusakan. Mengingat bencana banjir yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya serta Kecamatan Malunda yang sudah rawan bencana banjir pada tahun-tahun sebelumnya, maka pemerintah perlu memiliki strategi dalam penanggulangan banjir tersebut agar dapat mengurangi kerugian dan dampak setelah banjir. Sudah sewajarnya bencana banjir sebagai isu nasional yang harus ditanggulangi oleh pemerintah.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan banjir dan banyak aplikasi lainnya membuktikan bahwa masalah ini dapat diselesaikan melalui studi perencanaan dan proyek detail tentang daerah rawan banjir. Menentukan wilayah rawan banjir sangat penting pengambil keputusan untuk perencanaan atau pengelolaan kegiatan (Yalcin dan Akyurek, 2004).

Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana

sebagaimana di amanatkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18.

Pemerintah daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi memberikan dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana, memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah, melindungi masyarakat dari ancaman bencana, melaksanakan tanggap darurat, serta melakukan pemulihan pasca bencana.

Melihat akan bencana banjir yang melanda Kecamatan Malunda, pada tahun 2022 tepatnya pada Bulan Mei cukup menjadi pelajaran, bahwa pentingnya peran seorang pemerintah daerah dalam mengambil strategi yang harus dilakukan dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Malunda, Banjir tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas, merusak badan-badan jalan dan prasarana lainnya akibat sering tergenang air, lebih jauh dapat menimbulkan kerugian materil bahkan korban jiwa tetapi dalam bencana banjir yang melanda kecamatan Malunda ini tidak ada korban jiwa, hanya berbagai macam penyakit. Oleh karena itu perlu adanya penanggulangan bencana banjir untuk mengurangi atau meminimalisir dampak-dampak yang akan terjadi jika

banjir. Selain itu, latar belakang ini juga dapat didukung oleh penelitian terdahulu yang telah dilakukan di bidang ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Apa saja Strategi BPBD dalam menanggulangi bencana Banjir di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene?
2. Bagaimana efektivitas strategi BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja Strategi BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ?
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene ?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah daerah terkhusus di lembaga BPBD dalam penanggulangan bencana alam.

2. Instansi Pemerintah

Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rencana pemulihan kawasan rawan banjir dan penanggulangan bencana di Kabupaten Majene.

3. Masyarakat

Bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam penanggulangan resiko bencana alam, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana alam dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang karakteristik kawasan rawan banjir di Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Strategi

Strategi merupakan suatu alat atau tindakan yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai kinerja yang konsisten. Secara etimologi, strategi berasal dari turunan kata dalam bahasa Yunani yaitu *Strategos*, yang berarti “Komandan Militer” pada zaman demokrasi Athena. Pada awalnya kata ini digunakan untuk kepentingan militer saja akan tetapi berkembang ke berbagai di bidang.

Sedangkan secara istilah strategi memiliki beberapa arti diantara para ahli yang mendefinisikan strategi adalah yang menyatakan bahwa strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang bertujuan pada prospek jangka panjang bagi organisasi dan penyusunan berbagai upaya dalam menggapai tujuan dari rencana tersebut (Stephenie & K.Marrus, 2002). Ada beberapa pengertian strategi menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Adapaun tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi dampak-dampak perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal (Rangkuti, 2019).
2. Strategi merupakan rencana yang disatu padukan secara menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan dari organisasi dengan segala tantangan lingkungan dan yang dirancang telah sesuai untuk mencapai tujuan dari perencanaan organisasi dalam pelaksanaannya (Jauch, 1998).

3. Strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat (Lynch, 2006).
4. Strategi merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi (Wright, 1996).
5. Strategi Menurut Fred R. David (2017) mendefinisikan strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang dan berorientasi terhadap masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multi fungsional dan multi divisional serta perlu mempertimbangkan baik faktor internal maupun eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi.
6. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) untuk mencapai suatu tujuan. Strategi harus menunjukkan bagaimana taktik operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen strategis adalah proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang digunakan untuk merumuskan dan menerapkan strategi yang efektif (Yumna, 2022). Strategi adalah alat komunikasi di mana orang-orang strategis mencoba untuk memastikan bahwa orang yang tepat mengetahui apa tujuan dan sasaran organisasi, dan bagaimana mereka ditempatkan dalam melaksanakan tindakan mereka.

Secara umum strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai penyusunan suatu cara atau

upaya yang di lakukan oleh sekelompok orang dengan maksud agar tujuan tertentu. Sedangkan secara khusus Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat di masa depan. Strategi hampir selalu dimulai dari apa sudah terjadi dan bukan dimulai dari apa yang belum terjadi (Sedarmayanti, 2022). Berikut tahapan atau langkah-langkah dalam menentukan sebuah strategi Menurut Fred R. David (2017,3):

1. Strategi

Pada tahap ini mencakup visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Pelaksanaan Strategi

Melaksanakan sebuah strategi adalah hal yang paling menyulitkan dalam proses strategi karena didalamnya akan melibatkan beberapa faktor dan bisa juga mempengaruhi adanya perubahan dalam pelaksanaan ketika di lapangan dan dapat merubah apa yang sebelumnya direncanakan. Penerapan strategi sering disebut tahap aksi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Menerapkan strategi berarti memobilisasi sumber daya yang ada untuk melaksanakan strategi yang telah dirumuskan.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam merumuskan strategi. Penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi

semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang, karena berbagai faktor eksternal dan internal terus berubah

Ada pun tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar :

- a) Peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini.
- b) Pengukuran kinerja.
- c) Pengambilan langkah kolektif.

2.2 Pengertian Bencana Banjir

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Ramli & Soehatman, 2010). Bencana merupakan bagian dari kehidupan manusia yang datang tanpa diduga kapan, dimana dan bagaimana terjadinya. Oleh karena ketidakpastian tersebut banyak masyarakat yang tidak peduli dan tidak pernah menyiapkan diri untuk menghadapinya.

Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi

menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain” (Sebastian & Ligal, 2008).

Bencana banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh perlakuan masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Pada diagram mekanisme terjadinya banjir dan bencana, terlihat bahwa faktor alamiah yang utama adalah curah hujan. Faktor alami lainnya adalah erosi dan sedimentasi kapasitas sungai, kapasitas drainase yang tidak memadai, pengaruh air pasang, perubahan kondisi daerah pengaliran sungai (DPS), dll. Sedangkan faktor non alamiah penyebab banjir adalah adanya pembangunan kompleks perumahan atau pembukaan suatu kawasan untuk lahan usaha yang bertujuan baik sekalipun, tanpa didasari dengan pengaturan yang 11 benar akan menimbulkan aliran permukaan yang besar atau erosi yang menyebabkan pendangkalan aliran sungai. Akibatnya, debit pengaliran sungai yang terjadi akan lebih besar dari pada kapasitas pengaliran air sungai sehingga terjadilah banjir.

Fenomena banjir selalu dikaitkan dengan sungai. Banjir terjadi apabila debit air yang mengalir melalui bagian penampang sungai tidak tersalurkan dan tertampung sampai lembah aliran sungai. Tidak tersalurnya air sungai dengan baik disebabkan oleh badan sungai yang semakin sempit karena didesak permukiman warga. Banjir juga dapat terjadi karena sungai tersumbat sampah sehingga daya mengalirkan air tidak seimbang. Pada umumnya, banjir terjadi pada musim hujan. Banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat tergantung

pada waktu hujan, lama hujan, dan banyaknya curah hujan. Sistem DAS dapat memiliki luasan sempit ataupun luasan yang besar. Pada permulaan musim hujan, jarang terjadi banjir sebab air hujan yang turun baru mampu membasahi lapisan tanah permukaan. Akibatnya, air hujan yang menjadi aliran permukaan masih sedikit. Apabila lapisan tanah sudah mulai penuh air, jumlah aliran permukaan bertambah banyak, dan apabila aliran permukaan ini tidak ada yang menghambat, hampir semuanya mengalir ke sungai. Hambatan aliran air di permukaan dapat berupa serasah hutan dan tanaman hutan.

2.3 Teori Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan dari bencana. Model manajemen bencana sering kali dibagi menjadi empat tahap:

- Mitigasi: Upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum terjadi.
- Kesiapsiagaan: Persiapan dan perencanaan sebelum bencana terjadi.
- Tanggap Darurat: Tindakan langsung untuk menangani dampak bencana saat terjadi.
- Pemulihan: Upaya untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan setelah bencana terjadi (Alexander, 2018).

2.4 Strategi Penanggulangan Banjir

Strategi penanggulangan banjir mencakup berbagai pendekatan yang terintegrasi dan holistik. Strategi ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

- Struktur: Pembangunan infrastruktur fisik seperti bendungan, tanggul, dan saluran drainase untuk mengendalikan aliran air (Ward et al., 2013).
- Non-Struktur: Pendekatan yang melibatkan kebijakan, peraturan, dan pendidikan masyarakat untuk mengurangi risiko banjir. Ini termasuk penggunaan sistem peringatan dini, zonasi lahan, dan pengelolaan tata ruang (Lumban-Gaol et al., 2019).
- Adaptasi: Penyesuaian terhadap perubahan iklim dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi banjir melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan lokal (Mukti et al., 2020).

2.5 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

BPBD memiliki peran kunci dalam manajemen bencana di tingkat lokal. Beberapa tugas utama BPBD meliputi:

- Koordinasi: Mengkoordinasikan berbagai pihak terkait dalam penanggulangan bencana, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (Prihatin, 2016).
- Kesiapsiagaan: Menyusun rencana kontinjensi, mengadakan pelatihan dan simulasi bencana, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat (Kodoatie, 2018).
- Respon: Melakukan tindakan cepat dan tepat saat bencana terjadi, termasuk evakuasi, penyelamatan, dan penyediaan bantuan darurat (Hidayati & Tsuyuki, 2018).

- Pemulihan: Merencanakan dan melaksanakan upaya pemulihan pasca bencana untuk mengembalikan kondisi normal dan meningkatkan ketahanan masyarakat (Budiyono et al., 2016).

2.6 Teori Stakeholder

Teori stakeholder menekankan pentingnya melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana. Stakeholder dalam penanggulangan bencana banjir termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Kerjasama dan kolaborasi antara stakeholder ini sangat penting untuk memastikan efektivitas strategi penanggulangan bencana (Freeman et al., 2017).

2.7 Teori Sistem Sosial-Ekologis

Teori sistem sosial-ekologis melihat interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks penanggulangan bencana. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami dinamika ekosistem dan peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Implementasi strategi penanggulangan banjir harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan (Ostrom, 2015).

2.8 Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut (Thoha & Miftah, 1995) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik,

sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Sementara menurut (1998) bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintah yaitu :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya yang meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya : membantu orang tidak mampu dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan antar bangsa, serta kebijakan lain

yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

Menurut Ndraha yang dikutip Syafii (2007), bahwa di antara fungsi pemerintahan adalah :

Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah.

2.4 Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam. Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal. Upaya

tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal. 23 Fokus pemerintahan lokal, masalah manajemen bencana difokuskan pada pemerintah lokal, ada beberapa alasan yaitu :

1. Manajemen bencana di implementasikan oleh pemerintah lokal.
2. Pemerintah lokal mempunyai peran aktif dalam manajemen bencana.
3. Pemberian wewenang yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
4. Kebijakan respons bencana memerlukan tempat secara lokal. Alasan-alasan tersebut mendasari manajemen bencana diwilayah lokal merupakan kunci dalam pelaksanaan manajemen bencana.

2.5 Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Dalam penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian.

2.6 Penanggulangan Bencana

Berdasarkan UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan oleh faktor

alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi. Definisi bencana seperti dipaparkan di atas mengandung tiga aspek dasar yaitu

1. Terjadinya peristiwa atau gangguan terhadap masyarakat.
2. Peristiwa atau gangguan tersebut membahayakan kehidupan dan fungsi dari masyarakat.
3. Mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi sumber daya mereka.

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana.

- Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
- Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

- Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU RI No. 24/2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan bencana

berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Jadi pengertian ini justru berangkat dari sikap bahwa bencana tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

2.6.1 Tujuan Penanggulangan Bencana

Pada pasal 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Tujuan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan bencana ialah sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kerdermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2.6.2 Tahapan-tahapan Penanggulan Bencana

Pengertian tahapan dapat diartikan sebagai suatu tingkatan ataupun jenjang. Sedangkan pengertian penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Penanggulangan bencana menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan

kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Para pihak yang terlibat untuk pengelolaan bencana meliputi unsur-unsur pemerintah (*enabler*), perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sukarelawan/ti (*volunteer*), swasta/ investor, kontraktor, konsultan, masyarakat dan lain-lain. Pemerintah dibantu *stakeholders* lainnya sebagai mitra dalam pengelolaan bencana secara terpadu. Para pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan peran masing-masing, mulai dari jauh sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Tahapan penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu proses berjenjang dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak suatu bencana, melalui serangkaian kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, agar terciptanya suatu kondisi yang aman namun tetap waspada terhadap bencana. Jadi manajemen bencana bukanlah hanya sekedar memberikan pertolongan kepada korban yang terkena bencana seperti yang selama ini dipahami. Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana.

2.7 Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut Pra Bencana.

1. Kesiagaan

Kesiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut Gillespie dan Streeter, kesiagaan adalah sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan pra bencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektifitas respons masyarakat selama bencana. Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin ditengah masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.

2. Peringatan Dini

Peringatan dini adalah langkah yang dilakukan dengan memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau badai.

3. Mitigasi

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya dan pendekatan.

a) Pendekatan Teknis

Secara teknis mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana misalnya:

- Membuat rancangan atau desain yang kokoh dari bangunan sehingga tahan terhadap gempa.
- Membuat material yang tahan terhadap bencana, misalnya material yang tahan api.
- Membuat rancangan teknis pengamanan, misalnya tanggul banjir, tanggul lumpur, tanggul tangki untuk mengendalikan tumpahan bahan berbahaya

b) Pendekatan Manusia

Pendekatan secara manusia ditujukan untuk membentuk manusia yang paham dan sadar mengenai bahaya bencana. Untuk itu perilaku dan cara hidup manusia harus dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

c) Pendekatan Administratif

Pemerintah atau pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen bencana, khususnya di tahap mitigasi sebagai contoh:

- Penyusunan tata ruang dan tata lahan yang memperhitungkan aspek risiko bencana.
- Sistem perizinan dengan memasukan aspek analisa risiko bencana.

- Penerapan kajian bencana untuk setiap kegiatan dari pembangunan industri berisiko tinggi.
- Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan.
- Menyiapkan prosedur tanggap darurat dan organisasi tanggap darurat di setiap organisasi baik pemerintahan maupun industri berisiko tinggi.

d) Pendekatan Kultural

Masih ada anggapan dikalangan masyarakat bahwa bencana itu adalah takdir sehingga harus diterima apa adanya. Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan kemampuan berpikir dan berbuat, manusia dapat berupaya menjauhkan diri dari bencana disesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal yang telah membudaya sejak lama.

Kerusakan lingkungan semakin hari semakin terlihat begitu jelas. Perlu kita memikirkan upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki lingkungan kita agar terciptanya ketertiban, kebersihan dan keindahan. Langkah awal melakukan perbaikan dapat dilakukan dengan cara memperhatikan keadaan lingkungan sekitar kita baru di lingkungan nasional. Menurut (Nurjanna, 2012), upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu :

1. Mitigasi

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik

maupun nonfisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan nonfisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.

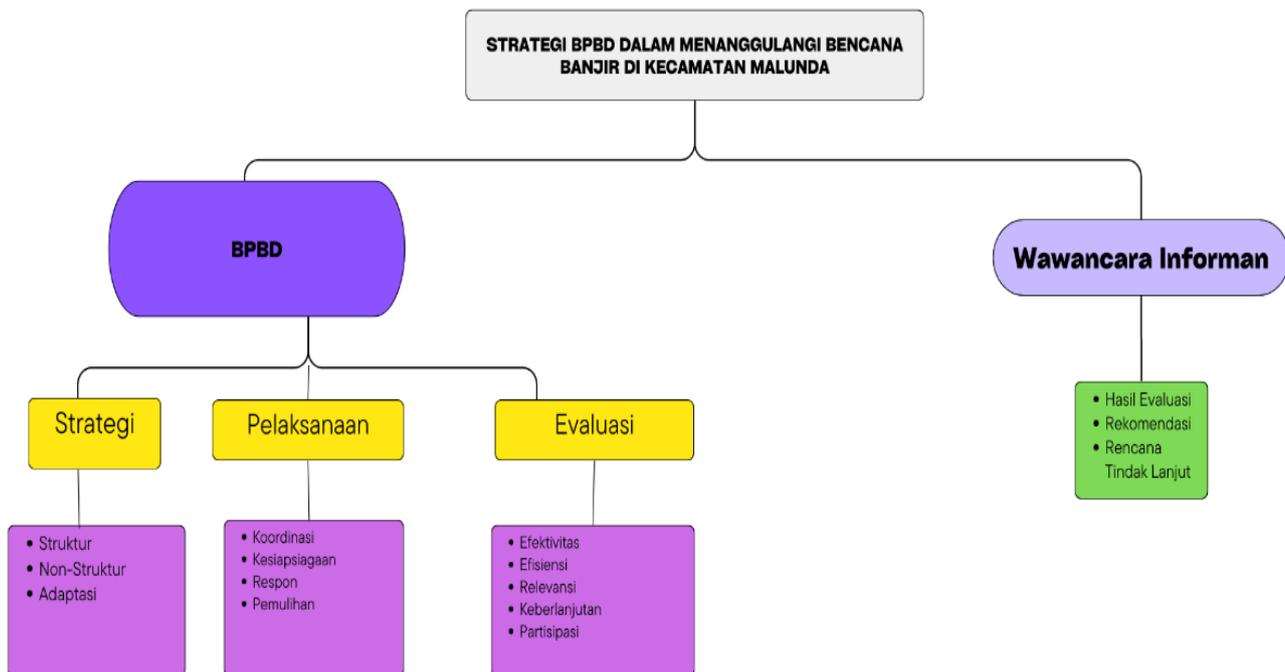
2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti :

- Membentuk Tim Penanggulangan Bencana.
- Memberikan penyuluhan - penyuluhan.
- Merelokasi korban secara bertahap.

2.8 Kerangka Pikir

Banjir pada umumnya disebabkan curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tak mampu menampung banyak air hujan sehingga meluap.

Daya tampung sistem pengaliran air tak selamanya sama tapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Adapun upaya penanggulangan banjir dan langkah-langkah penanggulangan banjir yaitu dimana terdapat menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan yang di timbulkan oleh banjir, dan melakukan penghijauan dan membangun kesadaran masyarakat. Penggundulan hutan di daerah tangkapan yang meresap air hujan juga peningkatan debit air dari daerah hulu ke daerah hili sehingga debit kapasitas aliran sungai dan memicu terjadinya erosi lahan yang menyebabkan sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lain.



Tabel 2.1. Kerangka Berfikir

2.9 Penelitian Terdahulu

Para penelitian terdahulu mengenai strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam yaitu, “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir Di Aceh Utara (Studi Kasus Fenomena Banjir Setiap Tahun Di Aceh Utara)” dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah daerah yaitu ada dilakukannya pembangunan waduk dan merehab kembali perbaikan tanggul yang rusak akibat banjir. Perumusan atau Perencanaan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengadakan Program pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan untuk setiap masyarakat khususnya daerah yang rawan bencana banjir untuk dikirimkan perwakilan desanya guna dilakukan pelatihan di kantor BPBD (Maula Masthura, 2022). Selanjutnya pada penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros” dan memperoleh hasil yakni Perumusan atau perencanaan, menunjukkan bahwa terdapat beberapa perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai macam Perencanaan atau Perumusan yaitu adanya dilakukannya Musrenbang termasuk membahas penanggulangan bencana banjir adapun Perumusan atau Perencanaan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros mengadakan Program Kampung iklim, mengatasi banjir dua hal yaitu adaptasi dan mitigasi. Pelaksanaan atau implementasi yang direncanakan sudah berjalan dengan yang di rencanakan mulai dari pembuatan tanggul, bendung, jalanan-jalanan dianggap rendah, himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar terkhusus di bantaran sungai dan adanya penanaman pohon sekitar mata air.

Evaluasi segala bentuk perencanaan, pelaksanaan bagian evaluasi sebagai finishing atau sebagai bentuk perbaikan-perbaikan. Faktor pendukung dan penghambat dalam penelitian yakni faktor pendukungnya adalah adanya Bupati Kabupaten Maros yang langsung turun tangan bersama pejabat yang bersangkutan dan juga mahasiswa yang ikut turun dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan sebagian besar masyarakat juga ikut merespon dengan baik. Adapun faktor penghambat yakni masalah anggaran yang sangat terbatas dan ada saja pro dan kontra yang terjadi dilapangan terhadap masyarakat (Dwi Nur Ilma Aulia, 2019). Kemudian juga terdapat penelitian yang berjudul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Makassar” dengan hasil penelitiannya adalah upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar yang telah dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa alat dan lahan, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan saluran air secara profesional sehingga air dapat mengalir ketempat yang sediakan di samping di dukung oleh penghijauan yang dilakukan di daerah hulu sebagai peresap titik air ketika turun hujan, agar air yang berasal dari daerah hulu tidak terlalu banyak mengalir ketempat penampungan yang dapat menyebabkan pengelupaan ke daerah hilir/daerah dataran rendah, sehingga tidak terjadi banjir dan faktor – faktor keberhasilan penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar yaitu adanya dukungan pemerintah Kota Makassar dalam membangun BPBD dan adanya bantuan dana yang diberikan dari anggaran pendapatan belanja daerah, banyaknya instansi/organisasi yang ikut andil dalam penanggulangan sehingga mempermudah proses penanggulangan bencana banjir. Dan terkait masalah sumber daya manusia

yang tidak berkompeten (tidak memiliki basic penanggulangan bencana) padahal Kota Makassar mempunyai organisasi yang berkompeten dibidang penanggulangan bencana seperti SAR, PMI, PRAMUKA dan lain-lain. (Desi Rahmawati, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Herdiansyah. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jauch, L. R. (1998). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan* Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Nurjanna. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- R, David. Fred. (2017). *Strategic Management: Manajemen Strategi Konsep* Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramli, & Soehatman. (2010). *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire)*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Suryohadiprojo. (1998). *Masalah Pertahanan Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Syafii, M. (2007). *The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Tazkia multimedia & proLm Centre.
- Thoha, & Miftah. (1995). *Dimensi Prima Administrasi Negara*. Yogyakarta: FISIP.
- Yumna. (2022). *Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Siswa*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Badjido. (2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2, 159-170.
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, 140-145.
- Latief, A. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Palopo. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Lynch, D. J. (2006). Motivational Factors, Learning Strategies and Resource Management as Predictors of Course Grades. *College Student Journal*, 40, 423-428.
- Masthura, M. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Banjir Di Aceh Utara (Studi Kasus Fenomena Banjir Setiap Tahun Di Aceh Utara). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Metuek, N. (2022). Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir (Studi Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kota Manado). *Jurnal Governance*, 2-8.
- Sebastian, & Ligal. (2008). Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. *Jurnal Dinamika Teknik Sipil*, 8, 162-169.

- Sedarmayanti. (2022). Analisis Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi dan Semangat Kerja dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Stephenie, & K.Marrus. (2002). *Desain Penelitian Manajemen Strategi*. Jakarta: Jakarta Press.
- Aulia. (2019). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- BM, A. (2022). *Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Wilayah Sekitar Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Bosowa Makassar.
- Rahmawati, B. (2015). *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Statistik, B. P. (2021). *Kecamatan Malunda Dalam Angka*. Majene: Badan Pusat Statistik Majene.